PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA LIMA KABUPATEN PERBATASAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

FADHILA SYAHIRA
NIM. B1011181073

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Fadhila Syahira
NIM	:	B1011181073
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir (TA)	:	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Lima Kabupaten Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 26 Juni 2025



Fadhila Syahira
NIM. B1011181073

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Fadhila Syahira
NIM	:	B1011181073
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir (TA)	:	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Lima Kabupaten Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tigas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 26 Juni 2025



Fadhila Syahira

NIM. B1011181073

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangungan Manusia Pada Lima Kabupaten Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Yuridis

Fadhila Syahira
B1011181073

Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA)	:	26 Juni 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Yanto, S.E., M.Sc. NIP 197706152003121004	19/8/2025	
2.	Ketua Penguji	Romi Suradi, S.E.I., M.E NIP 198610022019031004	7 Agustus 2025	
3.	Anggota Penguji	Rio Laksamana, S.E. M.E. NIDN 1110098503	5 Agustus 2025	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 25 AUG 2025
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul **"Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Lima Kabupaten Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat"** yang disusun sebagai syarat akademis dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak mungkin diselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih pada:

1. Dr. Barkah, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Hj. Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Metasari Kartika, S.E., M.E., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Yanto, S.E., M.Sc., selaku Koordinator Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah meluangkan waktu dengan sabar dan bijaksana dalam membimbing serta memberikan arahan, nasehat dan semangat penulis sampai terselesaikannya Tugas Akhir ini.
5. Romi Suradi, S.E.I., M.E., sebagai Dosen Penguji (Ketua Penguji) yang telah memberikan arahan, nasehat di dalam penulisan Tugas Akhir.
6. Rio Laksamana, S.E., M.E., sebagai Dosen Penguji (Anggota Penguji) yang telah memberikan arahan, nasehat di dalam penulisan Tugas Akhir.

7. Teristimewa untuk keluarga tercinta, Ayah dan Mama beserta seluruh keluarga besar yang selalu menjadi rumah terhangat dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih yang tak terhingga atas cinta tanpa syarat, doa yang tak pernah putus serta keyakinan yang begitu besar terhadap setiap pilihan dan mimpi-mimpi penulis.
8. Ondi Pradwi yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, serta memberi dukungan, semangat, tenaga, materi maupun bantuan kepada penulis selama 3 tahun terakhir.
9. Teman-teman Keluarga Medan, Fitria Dinda, Kiki Istari, Tania Marantika, Yuyun Kurniasih, Hairi Fadillah, Muhammad Rizky Rivaldo, Alief Rahman, Rahman Dani dan M. Rachmat Wibisono terima kasih sudah menjadi bagian yang selalu mewarnai hari-hari kuliah dengan tawa, candaan receh, dan kebersamaan yang tak ternilai.

Segala upaya dan kemampuan yang maksimal telah peneliti berikan dalam penulisan Tugas Akhir ini guna sebagai penambahan, pengembangan wawasan dan studi. Namun demikian penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini belum sempurna. Mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis peroleh sampai saat ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna tercapainya kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Pontianak, 18 Juni 2025
Peneliti

Fadhila Syahira
NIM. B1011181073

RINGKASAN

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Lima Kabupaten Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat”. penulis memilih judul ini karena pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan yang kerap menghadapi berbagai keterbatasan pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator utama kesejahteraan masyarakat dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas layanan kesehatan, mutu pendidikan, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis sejauh mana alokasi belanja pemerintah pada ketiga sektor tersebut berkontribusi terhadap peningkatan IPM di lima kabupaten perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah kawasan perbatasan sering mengalami ketertinggalan dalam pembangunan. Data menunjukkan bahwa IPM di perbatasan Kalimantan Barat masih dalam kategori “sedang” mencerminkan rendahnya pembangunan manusia. Peningkatan IPM diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Pemerintah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM melalui pengeluaran di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pengeluaran ini diharapkan meningkatkan IPM.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia pada lima kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat, menguji dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia pada lima kabupaten

perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat dan menguji dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia pada lima kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terkait. Adapun kontribusi yang diharapakan adalah sebagai berikut: Adapun kontribusi secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan wawasan ilmiah tentang pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur terhadap IPM di lima kabupaten perbatasan Kalimantan Barat dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan pendekatan dan cakupan yang berbeda. Adapun kontribusi secara praktis dimana temuan dari penelitian ini memberikan referensi kebijakan untuk meningkatkan SDM di lima kabupaten perbatasan Kalimantan Barat melalui pengeluaran di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dan sumber data bagi pemerintah pusat dan daerah, serta menyoroti pentingnya optimalisasi pengeluaran di tiga sektor tersebut guna meningkatkan kualitas SDM.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian pendekatan kuantitatif, dengan sumber data sekunder. Adapun jumlah sampel yang digunakan di dalam penelitian ini berjumlah 50, terhitung dari tahun 2012 sampai dengan 2021 (5 Kabupaten Perbatasan) di Provinsi Kalimantan Barat. meliputi uji model data panel (*common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*), pemilihan model data panel (*chow test*, *hausman test* dan *lagrange multiplier test*), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas), persamaan regresi liniear berganda dan terakhir uji hipotesis (kelayakan model *(goodness of fit),* parsial (uji t) dan koefisien determinasi (R^2)). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 1) pengaruh positif dan tidak signifikan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada lima kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat, 2) pengaruh positif dan signifikan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada lima kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat, 3) pengaruh positif dan tidak signifikan antara Pengeluaran

Pemerintah Bidang Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada lima kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat.

Kesimpulan penelitian: 1) Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada lima kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. Ketidaksignifikanan ini mencerminkan bahwa meskipun alokasi anggaran kesehatan meningkat, dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat belum optimal akibat berbagai kendala seperti efektivitas penggunaan anggaran, kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur dan tenaga kesehatan, serta *time lag* dalam dampak kebijakan, 2) Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di lima kabupaten perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran pendidikan berkontribusi langsung terhadap dimensi pengetahuan dalam IPM, khususnya melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, 3) Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di lima kabupaten perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur berperan penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, pengaruhnya terhadap IPM bersifat tidak langsung dan membutuhkan waktu untuk terlihat dampaknya.

Saran penelitian: 1) Pemerintah daerah di wilayah perbatasan disarankan untuk menerapkan prinsip efisiensi alokasi sumber daya publik sebagaimana dikemukakan oleh Musgrave, dengan fokus pada penguatan manajemen anggaran berbasis hasil *(result-based budgeting)*. Perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan perlu diarahkan pada intervensi yang langsung berdampak pada peningkatan indikator kesehatan masyarakat, seperti layanan kesehatan primer, pengendalian penyakit, serta gizi masyarakat, 2) Pemerintah daerah di wilayah perbatasan sebaiknya terus memperkuat komitmen dalam pengelolaan anggaran

pendidikan secara efektif dan berkelanjutan, dengan memprioritaskan program-program strategis seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penyediaan sarana prasarana belajar yang memadai, 3) Pemerintah daerah di wilayah perbatasan sebaiknya mengintegrasikan kebijakan pembangunan infrastruktur dengan prioritas sektor pendidikan dan kesehatan agar dampaknya terhadap IPM menjadi lebih signifikan. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas dasar lainnya perlu diarahkan secara strategis ke daerah yang masih terisolasi agar dapat membuka akses ke sekolah dan layanan kesehatan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Lima Kabupaten Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat

[1] Fadhila Syahira

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the Influence of Government Expenditure in Health, Education and Infrastructure on the Human Development Index in Five Border Regencies in West Kalimantan Province. The type of method used in this study is descriptive-quantitative. The data amounted to 50, namely from 2012 to 2021 (5 Border Regencies). The methods and analysis tools used are panel data methods, classical assumption tests, multiple linear regression analysis and hypothesis testing. Tools for processing data using the eviews software program version 10.0. The results of the data analysis show that 1) Government Expenditure in Health and Infrastructure has a positive and insignificant effect on the Human Development Index, and finally, 2) Government Expenditure in Education has a positive and significant effect on the Human Development Index.

Keywords: Government Expenditure on Health, Government Expenditure on Education, Government Expenditure on Infrastructure and Human Development Index.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Lima Kabupaten Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kuantitatif. Adapun data berjumlah 50, yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 (5 Kabupaten Perbatasan). Metode dan alat analisis yang digunakan ialah metode data panel, uji asumsi klasik, analisis regresi liniear berganda dan pengujian hipotesis. Alat bantu dalam mengelolah data dengan menggunakan program *software eviews versi 10.0*. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 1) Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Bidang Infrastruktur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan terakhir, 2) Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia

[1] fdhlsyahira@gmail.com

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

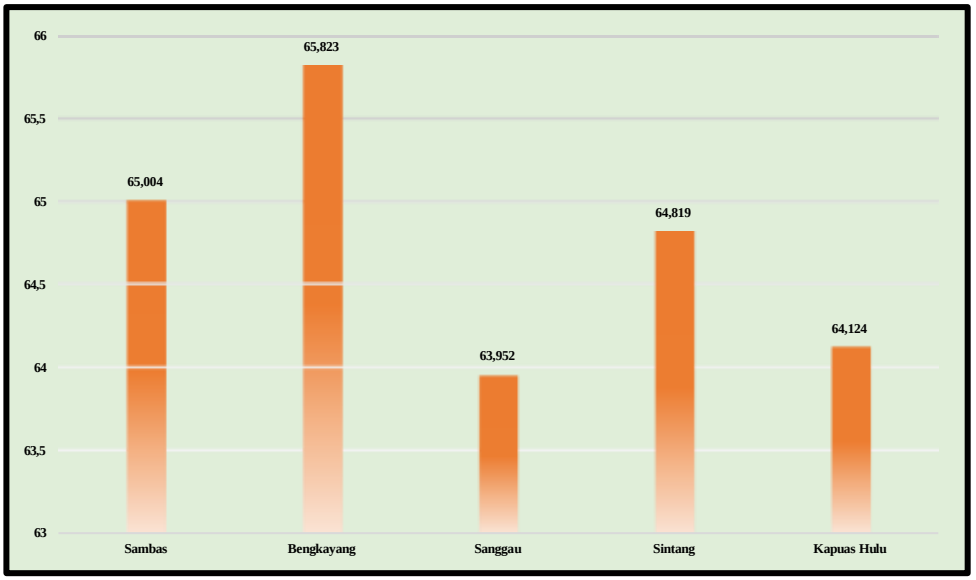
Kawasan perbatasan merupakan wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain dan sering tergolong tertinggal. Sebagai garda depan negara, kawasan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Berbagai tantangan seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pelayanan publik masih dihadapi (Todaro, 2013). IPM menjadi indikator untuk mengukur kesejahteraan melalui tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Ketiganya berkaitan dengan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, serta kebijakan pemerintah (Rosyid, 2018).

Berdasarkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia isu IPM di wilayah perbatasan Kalimantan Barat merupakan tantangan yang kompleks dan multidimensional. Wilayah perbatasan seperti Sambas, Sanggau, dan Kapuas Hulu menghadapi berbagai kesenjangan dibandingkan dengan pusat kota seperti Pontianak. Minimnya tenaga pendidik dan fasilitas sekolah menghambat peningkatan kualitas pendidikan, menyebabkan rendahnya angka partisipasi sekolah dibandingkan perkotaan (Yulianti & Qomariah, 2025). Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan layanan kesehatan akibat kurangnya tenaga medis dan fasilitas yang memadai, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat. Terbatasnya infrastruktur memperburuk kondisi wilayah perbatasan. Jalan rusak dan akses transportasi yang sulit menghambat distribusi layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat yang bergantung pada pertanian dan perkebunan menghadapi keterbatasan akses pasar, sehingga kesejahteraan tetap rendah (Weraman, 2024).

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kalimantan Barat juga menghadapi isu keamanan dan perdagangan ilegal. Tantangan ini menambah beban sosial ekonomi masyarakat setempat, yang berdampak pada stabilitas sosial dan pembangunan manusia. Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan multidimensional ini dengan pendekatan terpadu, seperti pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), peningkatan infrastruktur jalan paralel perbatasan, serta program peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Namun, karena saling terkaitnya berbagai faktor tersebut, peningkatan IPM di wilayah perbatasan memerlukan sinergi lintas sektor, perencanaan pembangunan yang terintegrasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal secara berkelanjutan (Hariyatie, 2015).

IPM berperan penting dalam perekonomian modern, karena kualitas sumber daya manusia yang baik mengoptimalkan faktor produksi dan mendorong inovasi. Peningkatan IPM juga meningkatkan jumlah penduduk dan konsumsi, yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Di kawasan perbatasan, peningkatan IPM dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal dengan alokasi anggaran untuk layanan dasar dan investasi sumber daya manusia. Diperlukan peran aktif pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan SDM kompetitif, meningkatkan IPM, serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Arfiyansyah & Khusaini, 2018). Pemerintah daerah berperan strategis dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal, khususnya pengeluaran

pemerintah. Stimulus ini diharapkan meningkatkan PDRB dan IPM untuk pembangunan berkelanjutan (Ariyansyah & Khusaini 2018). Di kawasan perbatasan Kalimantan Barat, peningkatan IPM memerlukan kebijakan yang berfokus pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (Muslihatinningsih dkk, 2022).

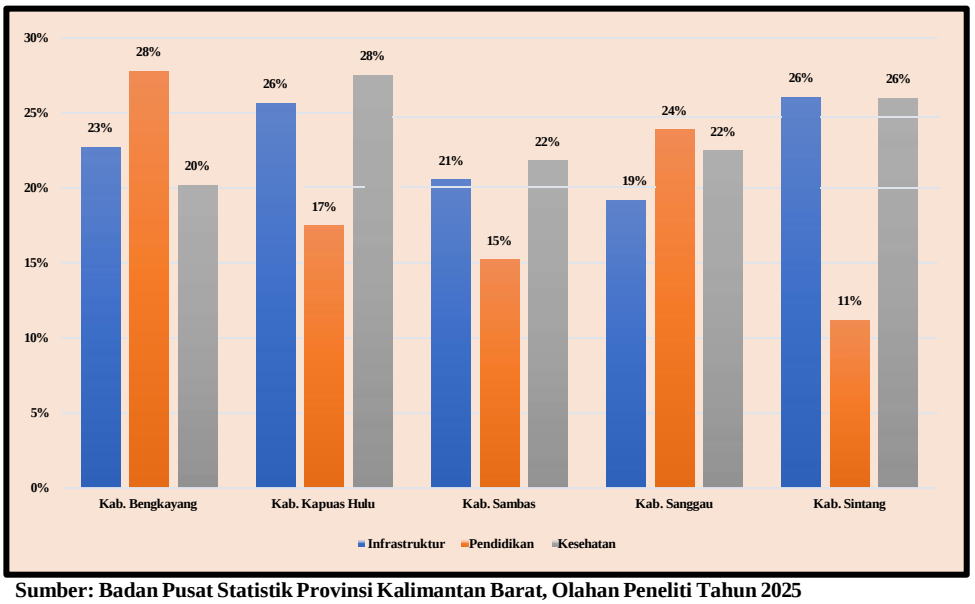


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Olahan Peneliti Tahun 2025

Gambar 1 Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia di 5 Kabupaten Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Periode 2012 s/d 2021

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka IPM pada daerah kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat memiliki memiliki angka dibawah 70,00 yang mana angka rata-rata IPM yang paling tinggi terdapat pada Kabupaten Bengkayang yakni sebesar 65,823. Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di wilayah perbatasan belum optimal. Keterbatasan infrastruktur, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta keterbatasan ekonomi menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan IPM di daerah tersebut. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dengan kebijakan yang mendukung peningkatan layanan publik dan pengembangan ekonomi lokal untuk mendorong peningkatan IPM secara menyeluruh (Hariyatie, 2015).

Besaran pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur pemerintah daerah wajib mengalokasikan minimal 10% untuk kesehatan, 20% untuk pendidikan, dan 25% untuk infrastruktur. Data menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur masih belum sesuai dengan peraturan. Untuk meningkatkan IPM di kawasan perbatasan Kalimantan Barat, pemerintah perlu mengoptimalkan kebijakan fiskal dengan alokasi anggaran yang tepat. Pengeluaran yang efektif di tiga sektor tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui PDRB per kapita serta pembangunan yang tercermin dalam IPM (Arfiansyah, 2018).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Olahan Peneliti Tahun 2025

Gambar 2 Rata-Rata Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan Dan Infrastruktur di 5 Kabupaten Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Periode 2012 s/d 2021

Pengeluaran Pemerintah pada bidang kesehatan pada 5 kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat memiliki realisasi yang berbeda-beda. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti di Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata besaran realisasi pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur tertinggi terdapat pada Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang (26%) dan daerah dengan realisasi terendah terdapat pada Kabupaten Sanggau (19%) terhadap pengeluaran pemerintah, pada bidang pendidikan daerah perbatasan yang memiliki tertinggi terdapat pada Kabupaten Bengkayang (18%) dan daerah terendah terdapat pada Kabupaten Sintang (11%), selanjutnya pada kesehatan realisasi pengeluaran pemerintah tertinggi terdapat pada Kabupaten Kapuas Hulu (28%) dan terendah terdapat pada Kabupaten Bengkayang (20%).

Penelitian mengenai pengaruh kebijakan fiskal terhadap IPM menunjukkan hasil beragam. Suparno (2018) menemukan bahwa pengeluaran kesehatan berdampak positif dan signifikan terhadap IPM di Kalimantan Timur, sementara Kahang et al. (2016) menyatakan sebaliknya. Ala (2016) menunjukkan pengeluaran infrastruktur meningkatkan IPM di NTT, sedangkan Rosyid (2018) menemukan dampak negatif dan tidak signifikan. Soleha & Fathurrahman (2017) mendukung pengaruh positif pengeluaran kesehatan terhadap IPM, namun Hakim & Sukmana (2017) justru menemukan dampak negatif dari pengeluaran kesehatan dan pendidikan terhadap IPM.

Kawasan perbatasan sering mengalami ketertinggalan dalam pembangunan. Data menunjukkan bahwa IPM di perbatasan Kalimantan Barat masih dalam kategori “sedang,” mencerminkan rendahnya pembangunan manusia. Peningkatan IPM diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Pemerintah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM melalui pengeluaran di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Berdasarkan latar belakang tersebut,

penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia pada Lima Kabupaten Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat.